



Australian Government

KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



**INDONESIA
DEVELOPMENT
FORUM 2018**
INSPIRE · IMAGINE · INNOVATE · INITIATE



INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK INDONESIA

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Dipresentasikan dalam Acara Peluncuran Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Jakarta, 11 Juli 2018**



ASIAN GAMES | 2018
Jakarta Palembang



ANNUAL MEETINGS
2018 | indonesia
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP



MENGAPA INDONESIA MEMBUTUHKAN INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF?



INDONESIA

Belum adanya konsep pembangunan ekonomi inklusif yang disepakati secara nasional, bahkan masing-masing organisasi internasional memiliki konsep yang berbeda-beda

Belum adanya instrumen untuk memantau perkembangan pembangunan ekonomi inklusif



PERTUMBUHAN INKLUSIF MENURUT BERBAGAI LEMBAGA INTERNASIONAL



Asian Development Bank

Pilar 1

Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi

Pilar 2

Perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan

Pilar 3

Jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim



INDONESIA

Kategori	Nilai	Bobot	Total
Pertumbuhan Ekonomi	4	.25	1.00
Ketenagakerjaan	4	.15	0.60
Infrastruktur Ekonomi	5	.10	0.50
Kemiskinan	2	.10	0.20
Ketimpangan	6	.10	0.60
Kesetaraan Gender	6	.05	0.30
Kesehatan dan Nutrisi	6	.05	0.30
Pendidikan	5	.05	0.25
Sanitasi dan Air Bersih	3	.05	0.15
Proteksi Sosial	5	.10	0.50
Total		1.00	4.40

NAMUN PERHITUNGAN INI BARU SEBATAS KERTAS KERJA, TIDAK ADA INDEKS TAHUNAN UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGANNYA

WORLD ECONOMIC FORUM

Definisi:

Suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberikan akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat



Kendala:

- Indeks negara maju tidak dapat dibandingkan dengan indeks negara berkembang
- Beberapa indikator tidak tersedia untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Cerminan untuk Tujuan Pembangunan Indonesia

Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional, dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif – Indonesia:

Dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar provinsi (ke depan akan dikembangkan untuk tingkat kabupaten/kota) sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang lebih tepat

Contoh:

- Tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan (gender, wilayah, dan pendapatan)
- Beberapa indikator tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia

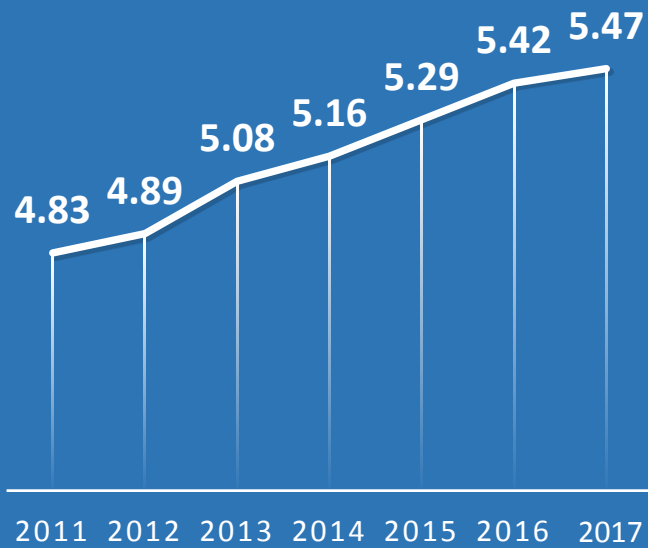
Contoh Indikator:

Pendapatan Bersih Gini,
Tabungan Bersih yang disesuaikan,
Intensitas Karbon terhadap PDB,
Utang Publik dan
Rasio Ketergantungan
(data tidak ada di level provinsi)

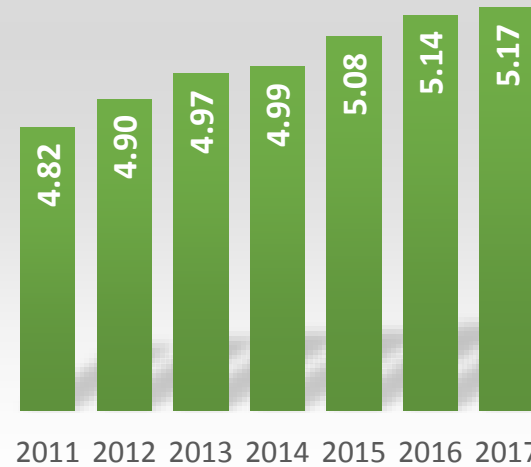


INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

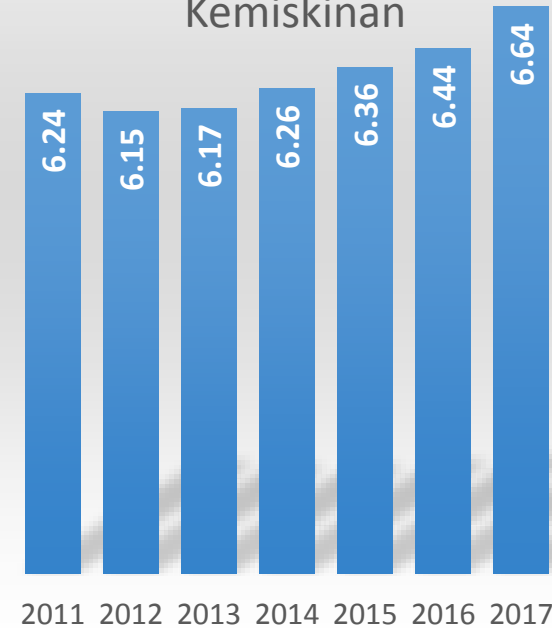
INDEKS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF



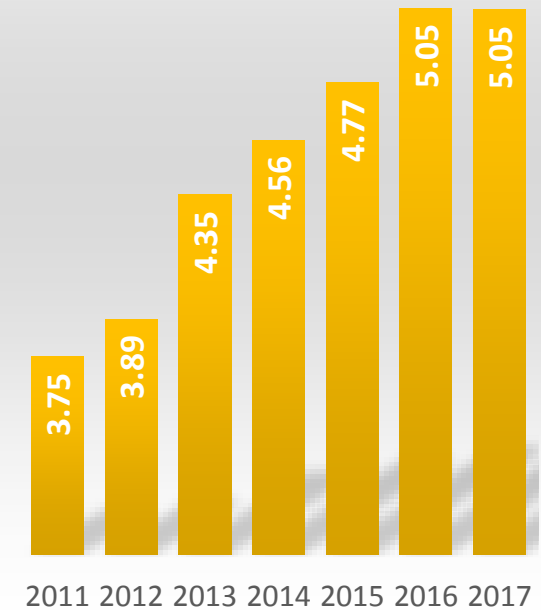
Indeks Pilar 1: Pertumbuhan Ekonomi



Indeks Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

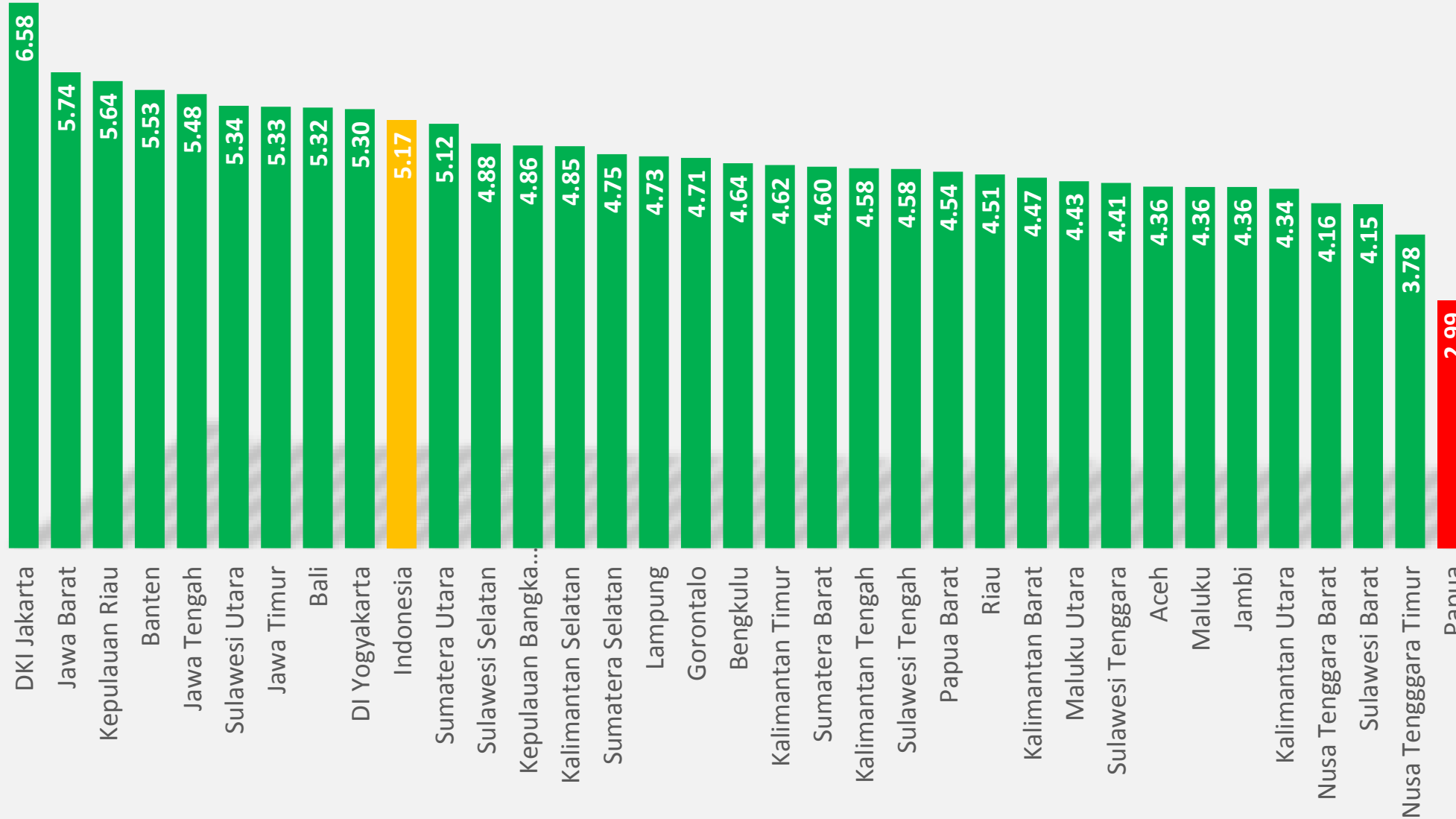


Indeks Pilar 3: Perluasan Akses dan Kesempatan



- Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”, nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan” dan nilai 8-10 merupakan kategori “sangat memuaskan”

Pilar I : Pertumbuhan Ekonomi

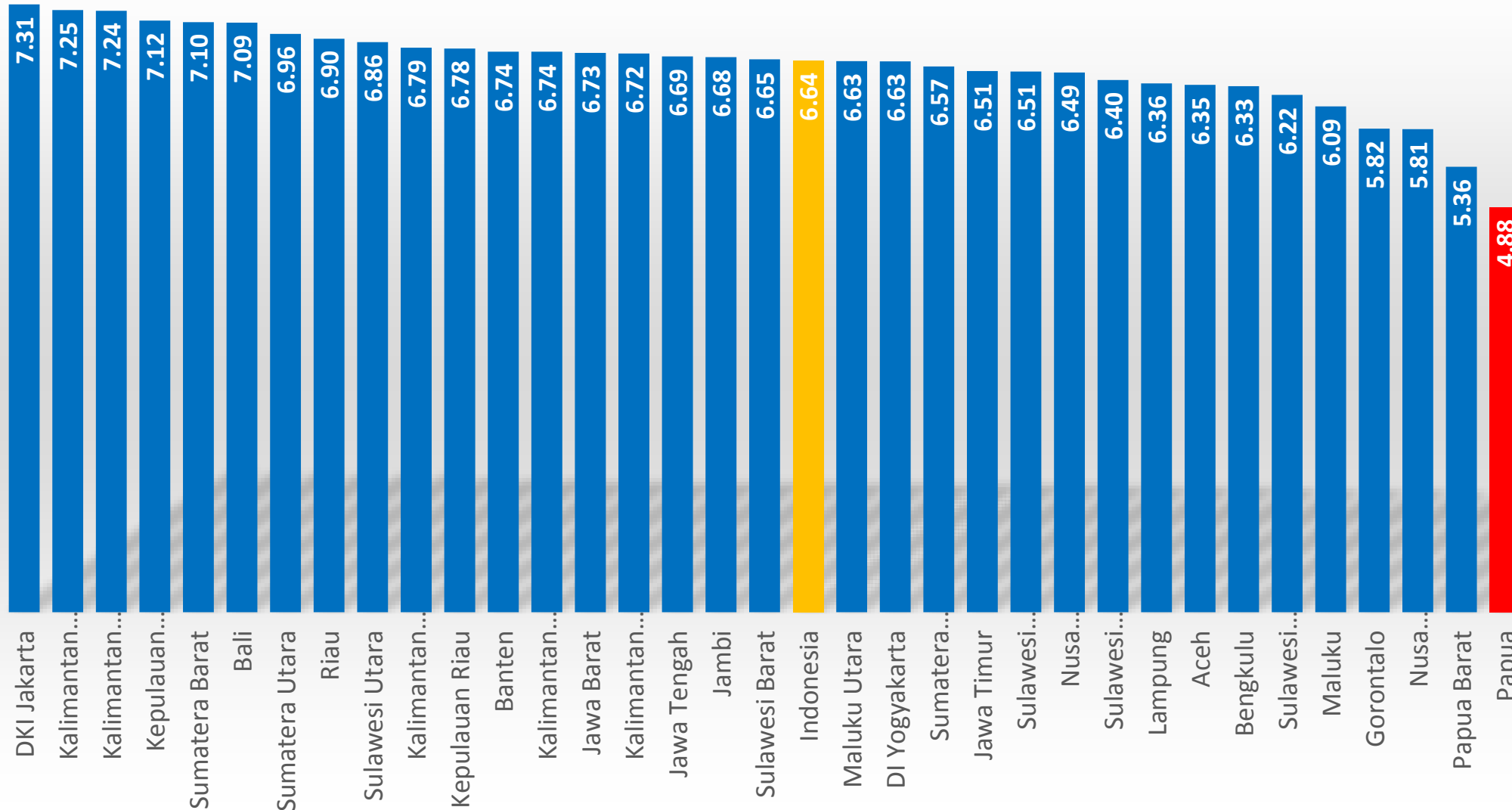


PERTUMBUHAN EKONOMI

DKI Jakarta mendapatkan nilai indeks pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,58.

Sedangkan untuk provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar pertumbuhan ekonomi adalah Papua, dengan nilai 2,99. Nilai Indeks secara nasional adalah **5,17.**

Pilar II : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

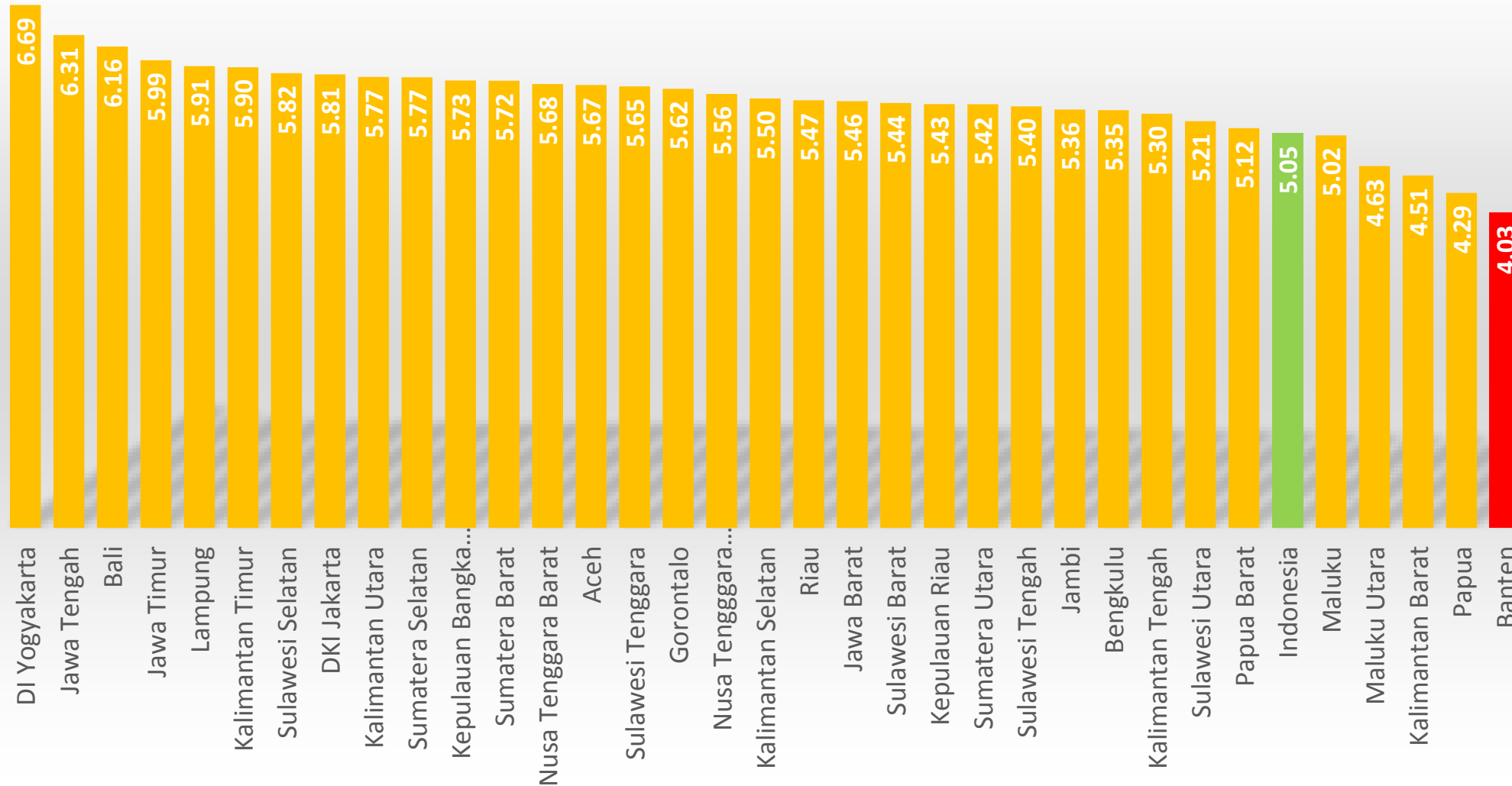


PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

DKI Jakarta mendapatkan nilai indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan tertinggi sebesar 7,31.

Provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar ini adalah Papua dengan nilai 4,88. Nilai Indeks secara nasional adalah **6,64.**

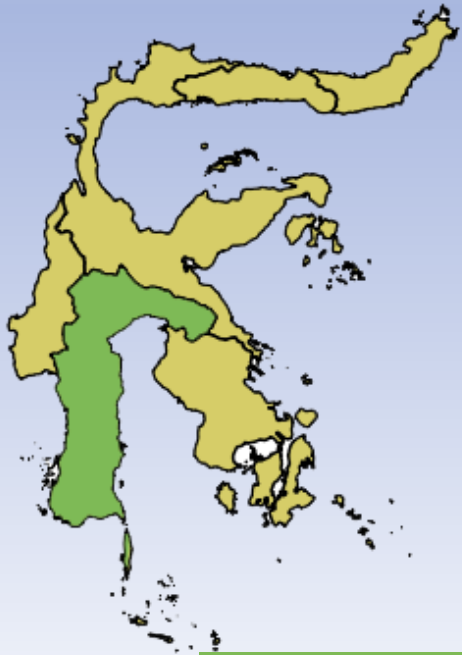
Pilar III : Perluasan Akses dan Kesempatan



PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

Di Yogyakarta mendapatkan nilai indeks perluasan akses dan kesempatan tertinggi sebesar 6,69.

Sedangkan untuk provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar perluasan akses dan kesempatan adalah Banten dengan nilai sebesar 4,03. Nilai Indeks secara nasional adalah **5,05**.



Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi ke-12 dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, tetapi belum menunjukkan inklusif yang tinggi



Pertumbuhan PDRB riil per kapita tinggi



Tingkat Kemiskinan Rendah



Perluasan Akses dan Kesempatan



Share Manufaktur terhadap PDRB Rendah



Persentase Pekerja >35 jam per minggu Rendah



Tingkat Ketimpangan Tinggi



Share
manufaktur
terhadap PDRB
rendah



- Tidak ada *supply* bahan baku yang berkelanjutan
- Faktor sosiologis/budaya orang Sulawesi sebagai “pedagang/saudagar”
- Kebijakan terkait hilirisasi sektor pertanian ke industri pengolahan belum optimal



% Pekerja >35
jam per
minggu rendah



- Terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian karena alih lahan, kekeringan, banjir, mekanisasi, serta preferensi TK muda
- Penurunan pekerja di sektor industri karena mekanisasi



Tingkat
Ketimpangan
Tinggi



Antar pendapatan:

- Mayoritas petani (70%) = petani penggarap, bukan pemilik lahan
- Mayoritas nelayan = buruh nelayan, bukan pemilik
- *Gap* upah antar sektor
- Perubahan struktur ekonomi
- Disparitas SDM antar kelompok pendapatan

Antar wilayah:

- Infrastruktur
- Komoditas unggulan yang sudah jenuh
- Faktor geografis-spasial dan *endowment* daerah



**Kementerian PPN/
Bappenas**

1

**Penyusunan *dashboard*
Indeks Pembangunan
Ekonomi Inklusif**

2

**Pengembangan Indeks
Pembangunan Ekonomi
Inklusif untuk Tingkat
Kabupaten/Kota**

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

Definisi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Menurut Lembaga-lembaga Internasional



ADB

Asian Development Bank

INCLUSIVE GROWTH

Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memluas kesempatan ekonomi serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat



THE WORLD BANK

INCLUSIVE GROWTH

Peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif.



OECD

INCLUSIVE GROWTH

Pertumbuhan ekonomi yang didistribusikan secara adil pada seluruh masyarakat dan menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat.



WORLD
ECONOMIC
FORUM

INCLUSIVE GROWTH

Suatu proses dan hasil dari pertumbuhan dan sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat berpengaruh dalam memperbaiki standar hidup secara luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

*Pembangunan ekonomi yang **menciptakan akses dan kesempatan yang luas** bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, **meningkatkan kesejahteraan**, dan **mengurangi kesenjangan** antar kelompok dan wilayah.*

PILAR I :
Pertumbuhan
Ekonomi Tinggi

Sub-Pilar:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Kesempatan Kerja
3. Infrastruktur Ekonomi

PILAR II :
Pemerataan
Pendapatan dan
Pengurangan
Kemiskinan

Sub-Pilar:

1. Ketimpangan
2. Kemiskinan

PILAR III:
Perluasan Akses
dan Kesempatan

Sub-Pilar:

1. Kapabilitas Manusia
2. Infrastruktur Dasar
3. Keuangan Inklusif

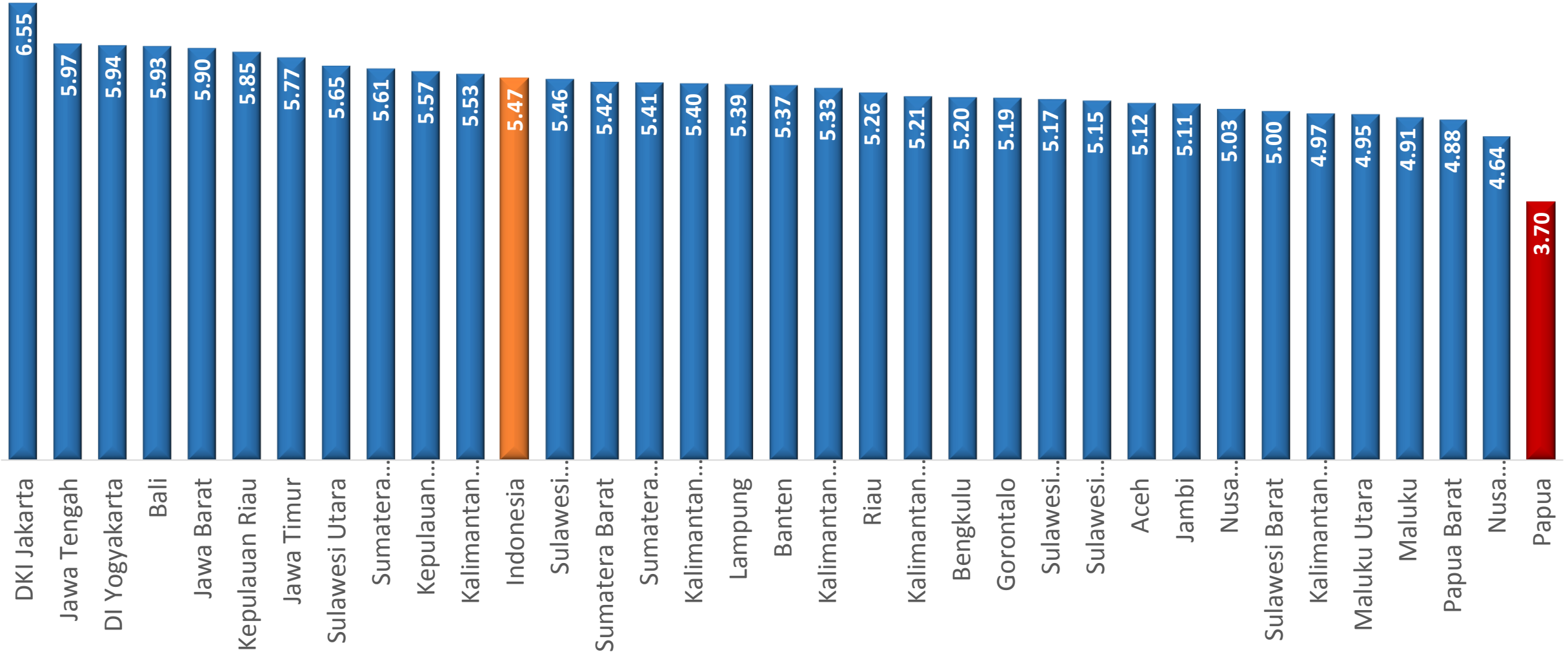
TOTAL INDIKATOR

21

DATA

Data per Provinsi di
Indonesia untuk
tahun 2015-2017
(34 PROVINSI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2017



• Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”, nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan” dan nilai 8-10 merupakan kategori “sangat memuaskan”